

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku, Majalah/Jurnal, Karya Ilmiah, Laporan Penelitian:

A. Garner., Bryan 1999, *Ed. Black's Law Dictionary: Eighth Edition*. West Publishing Co, St. Paul Minn.

M. Hadi Subhan, *Hukum Kepailitan prinsip, norma, dan praktik di peradilan*, cet.2, 2008, Kencana Prenada Media Group, Jakarta

Fuady, Munir. *Pengantar Hukum Bisnis*, 2001, Citra Aditya Bakti, Bandung

Fuady, Munir. *Hukum Pailit*. 2002, Citra Aditya Bakti, Bandung

Munir Fuady, *Hukum Pailit Dalam Teori dan Prektek*, Cet. III, 2005, Citra Aditya Bakti, Bandung

Rahayu Hartini, *Hukum Kepailitan*, 2008, UMM Press, Malang

Hadjon, Philipus M. *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia*, 1987, Bina Ilmu, Surabaya

Miru, Ahmad, dan Sakka Pati, *Hukum Perikatan Penjelasan Makna Pasal*

1233 Sampai 1456 BW, 2016, Rajawali Pers, Jakarta

Muljadi, Kartini. *Hukum Kepailitan, Penyelesaian Utang Piutang Melalui*

Kepailitan Dan PKPU 2001, Alumni, Bandung

Prasetya, Rudhi. *Kedudukan Mandiri Perseroan Terbatas, Disertai dengan*

Ulasan Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1995, Citra

Aditya Bakti, Bandung, 2001

Putro, Bramantyo Djohan. *Resrtukturisasi Perusahaan Berbasis Nilai*,

Penerbit PPM Jakarta, 2004

Rahmasari, Shinta. 2015, "Peran Penundaan Kewajiban Pembayaran

Utang Sebagai Sarana Restrukturisasi Utang Bagi Debitor Terhadap Para Kreditor: Studi Kasus PT Kertas Leces (persero)",

Tesis, Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Tidak Dipublikasikan, Depok

RM. Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum (Suatu Pengantar)*, Liberty,

Yogyakarta, 1988, hal. 97

Sihotang, Jefrianto. 2013, “Tugas dan Wewenang Pengurus pkpu Berdasarkan Undang Undang No. 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan Dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang”, *Laporan Penelitian*, Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara, Tidak Dipublikasikan, Medan.

Sinaga, Syamsudin. *Hukum Kepailitan Indonesia*, 2012, Tatanusa, Jakarta

Sjahdeini, Sutan Remy. *Hukum Kepailitan, Sejarah, Asas, dan Teori*, 2016, Prenadamedia Group, Jakarta.

Soerjono Soekanto dan Sri Mamuji, *Penelitian Hukum Normatif-Suatu Tinjauan Singkat*, Rajawali Press, 1985, Jakarta

Soerdjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, 1994, Jakarta: Raja Grafindo

Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Universitas Indonesia, 2007, Jakarta

Sulaiman, Robinton dan Joko Prabowo, *Lebih Jauh Tentang Kepailitn, (Tinjauan Yuridis: Tanggung Jawab Komisaris, Direksi dan pemegang Saham Terhadap Perusahaan Pailit)*, 2000, Pusat study

Hukum Bisnis, Fakultas Hukum Universitas Pelita Harapan,
Karawaci

Sunarmi, *Hukum Kepailitan Edisi 2*, 2010, Sofmedia, Jakarta

Sutedi, Adrian. *Hukum Kepailitan*, 2009, Ghalia Indonesia, Jakarta

Asosiasi Kurator & Pengurus Indonesia, Standar Profesi Kurator dan
Pengurus

B. Peraturan Perundang-Undangan

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata)

Kitab Undang-Undang Hukum Dagang (KUHD)

Undang-undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan Dan Penundaan
Kewajiban Pembayaran Utang

Undang-Undang No. 37 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbaas

Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (Permenkumham)

Nomor 2 Tahun 2017 Perubahan Atas Permenkumham Nomor 11

Tahun 2016 tentang Pedoman Imbalan Jasa Kurator dan Pengurus

Putusan Pengadilan Niaga Jakarta Pusat Nomor
40/Pdt.Sus/PKPU/2013/PN.Niaga.Jkt.Pst.

Penetapan Pengadilan Niaga Jakarta Pusat Nomor
40/Pdt.Sus/PKPU/2013/PN.Niaga.Jkt.Pst.

Putusan Homologasi Pengadilan Niaga Jakarta Pusat Nomor
40/Pdt.Sus/PKPU/2013/PN.Niaga.Jkt.Pst.

Putusan Pengadilan Niaga Surabaya Nomor 05/PKPU/2014/PN.Niaga.Sby.

Putusan Pengadilan Niaga Jakarta Pusat Nomor 113/Pdt.Sus-
PKPU/2018/PN Jkt.Pst.

Putusan Pengadilan Niaga Medan Nomor 7/PDT.SUS-
PKPU/2016/PN.Niaga-Mdn.

C. Internet

Robinton Sulaiman dan Joko Prabowo, *Lebih Jauh Tentang Kepailitn, (Tinjauan Yuridis: Tanggung Jawab Komisaris, Direksi dan pemegang Saham Terhadap Perusahaan Pailit)*, 2000, Pusat study Hukum Bisnis, Fakultas Hukum Universitaas Pelita Harapan, Karawaci

Hukumonline Rabu (31/8), “Kurator Bersuara tentang Aturan Baru Imbalan Jasa”, <https://www.hukumonline.com/berita/baca/lt57c8e4a71870b/kurator-bersuara-tentang-aturan-baru-imbalan-jasa>, diakses 20 September 2018

Philipus M. Hadjon. *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia*. (Surabaya: Bina Ilmu, 1987)

<http://raesaputri.blogspot.com/2016/09/tugas-dan-wewenang-pengurus-dalam-kpkpu.html>, Diunduh pada tanggal 11 Desember 2018

<https://www.hukumonline.com/berita/baca/lt51eef109a29b8/giliran-perusahaan-percetakan-terancam-tunda-bayar>. Diunduh pada tanggal 11 Desember 2018